

Dari Demokrasi ke Republik

Robertus Robet

Abstrak

Satu kesimpulan Daniel S. Lev tentang sejarah negara Indonesia bahwa negara ini lahir dengan nilai-nilai republik. Ada sejumlah perbedaan republik dan demokrasi. Pak Dan pernah mengemukakan hal ini secara khusus dalam sebuah ceramah. Tulisan ini hendak membantu memahami nilai-nilai republik yang dimaksud Pak Dan.

Keywords: republik, republikanisme, demokrasi.

Pada 1995, dalam satu kesempatan ceramah untuk Yayasan Soejatmoko, Daniel S. Lev menyampaikan sebuah pidato berjudul “Demokrasi atau Republik”. Di luar kebiasaan teks-teks Dan Lev yang biasanya berkisar pada tema politik hukum, konstitusi dan gejala demokrasi konstitusional di Indonesia, pidatonya kala itu, terkesan luar biasa. Di dalam pidato itu, terdapat pandangan yang secara paradigmatis dianjurkan secara rigid dan tegas, hampir-hampir ideologis.

Yang juga luar biasa adalah ajakan Dan Lev untuk menghadirkan kembali istilah Republik dalam pengertiannya yang *non common sensical*. Sebagaimana kita ketahui –bahkan hingga saat ini- pengertian Republik banyak dimengerti secara dangkal dan diterima secara *taken for granted*. Orang lupa atau tidak memahami pendasaran filsafat dan politik Republik yang sebenarnya telah mengakar dan menjadi tradisi paling kuno sekaligus paling kuat. Pidato Dan pada 1995 itu kemudian memberikan letupan awal bagi upaya merestorasi kembali pemahaman

mengenai Republik. Tulisan pendek ini, dibuat dengan sepenuhnya berkonsentrasi pada pidato Dan tersebut.

Tiga Fundamen Republikanisme Dan Lev

Sebelum menjelaskan makna Republik, Dan Lev terlebih dahulu membedakan secara dingin antara Demokrasi dan Republik. Demokrasi pada intinya, menurut Dan, adalah sistem yang memfasilitasi agar sebisa mungkin orang banyak (dewasa) bisa ikut terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan umum. Dengan demikian di dalam demokrasi, kesertaan dan partisipasi yang luas menjadi prasyarat utama. Makin banyak orang terlibat makin demokratis suatu sistem. Dan mengatakan bahwa:

Arti demokrasi politik ialah bahwa semua orang (dewasa) langsung ikut serta dalam pemerintahan. Kalau begitu, jelas bahwa di seluruh dunia sekarang tidak ada satu negara pun yang demokratis. Dan memang tidak mungkin. Mau tak mau, dalam negara moderen tidak bisa minta suara tentang setiap isu yang mau diputuskan. (Pidato, hlm. 3).

Melalui pengertian ini, demokrasi dikembalikan oleh Dan pada makna generiknya. Pengembalian ini dengan sendirinya, sekaligus juga menghapus pelbagai idealisasi dan normatifikasi demokrasi yang pada periode 90an bahkan hingga kini begitu menguat. Semula orang senantiasa memikirkan demokrasi dalam kerangka maksimalis; demokrasi didefinisikan sebagai semua ideal yang baik tentang kehidupan politik; demokrasi menghapus kekerasan, demokrasi mengandung keadilan sosial, perdamaian dan sebagainya. Pidato Dan itu mengembalikan kembali makna demokrasi ke makna asalnya.

Selain menempatkan kembali secara *konseptual* pengertian demokrasi, Dan di sini juga memberikan argumen praktis berkenaan dengan kenyataan bahwa sejauh berurusan dengan kehendak sebanyak-banyaknya orang terlibat dalam pemerintahan, maka memang tidak ada satu negara pun yang bisa sepenuhnya demokratis. Akibatnya sebagaimana dikatakan Dan Lev: '*Mau tak mau, dalam negara moderen tidak bisa minta suara tentang setiap isu yang mau diputuskan*'.

Dengan kata lain, di dalam suatu negara modern tidak semua hal bisa diselesaikan dengan *vote*. Lalu bagaimana soal-soal fundamental lainnya itu bisa dibereskan tanpa *vote*? Dalam pidato itu, Dan Lev memang kemudian tidak meneruskan untuk menjawab pertanyaan ini secara

khusus. Namun demikian tradisi Republikan jelas memiliki jawaban orisinal dalam berhadapan dengan pertanyaan di atas, Republikan mengajukan kembali suatu konsep yang juga makin hilang dari diskursus kepolitikan sekarang yakni konsep *VIRTUE*. *Virtue* tampil dalam berbagai pertimbangan, ini yang di dalam istilah politik Indonesia sering dikenali dengan istilah turunannya yakni 'kenegarawanan'. Dengan demikian, selain kerangka dan mekanisme prosedural, politik selalu mensyaratkan *virtue*, ini yang membuat politik bisa berjalan dengan seimbang.

Dalam pidato itu, untuk mengatasi kekosongan dalam demokrasi, Dan mengajukan unsur fundamental pertama dalam Republikan yakni kerangka dasar Republik yang menurutnya terdiri atas pranata-pranata sebagai berikut:¹

- 1) Pemisahan antara pemerintah dan masyarakat, dengan pengertian bahwa masyarakat primair dan pemerintah didirikan untuk melayani keperluan masyarakat.
- 2) Lembaga-lembaga pemerintah yang mempunyai fungsi terbatas dan ditetapkan hukum, antara lain saling mengawasi.
- 3) Lembaga pemilihan dan kepartaian politik untuk menyalurkan pendapat umum.
- 4) Pers yang berfungsi baik sebagai sumber penerangan dan pengawas lembaga negara.

Pada kerangka yang pertama, Dan menegaskan kembali pandangan kepublikan Republikan yang menekankan *common good* di atas kepentingan privat. Di sini ditegaskan juga fungsi negara dalam paham Republikan sebagaimana dikembangkan mulai dari Aristoteles, Cicero, Machiavelly, Rousseau dan Arendt yakni negara sebagai 'ekspresi dari kehendak umum'. Yang umum di sini selalu didefinisikan dalam orientasi Aristotelian mengenai 'kerangka keterlibatan bersama di dalam polis'. Dengan demikian Negara dipahami sebagai ekspresi dari praktek yang aktif dari warga yang bertanggung jawab. Akibatnya, di sini muncul suatu moral untuk menolak segala macam bentuk monopoli, totalisasi dan privatisasi kehidupan bernegara.

Pada kerangka yang kedua, ketiga, dan keempat Dan mengajukan pandangan dasar Republikan Modern sebagaimana dianjurkan Rousseau

¹ Lihat Pidato, hlm. 4.

dan Montesquie mengenai pembagian kekuasaan, Negara Hukum, prosedur pengambilan keputusan dan kebebasan Republikan.

Mengenai idealisasi penyaluran pendapat umum, ini gagasan khas Republikan sebagaimana dulu pada awalnya berkembang dalam pergulatan di Amerika Awal dalam “Federalist Paper”, yang nantinya bakal menjadi pemisah awal gagasan demokrasi dan gagasan republikan. Hanya menariknya di dalam Dan, persoalan lama dalam “Federalist Paper” itu, diinkorporasikan saja ke dalam kerangka paham Republik.

Fundamen kedua Republikanisme yang diajukan oleh Lev dalam pidatonya adalah Kewargaan atau Citizenship. Dan berpandangan bahwa negara pada dasarnya adalah ciptaan artifisial dan bukan alamiah. Pada akhirnya yang menentukan negara adalah rakyat atau orang banyak di dalamnya. Karenanya seringkali kemudian, para rejim yang memerintah – dalam upaya memperkuat negara- mengharapkan atau bahkan memaksa kesetiaan warga kepadanya, bisa dengan kekerasan bisa juga dengan memanipulasi sentimen tanah air. Selain itu, juga oleh karena di rakyat banyak itu sendiri terdiri atas berbagai macam golongan, maka kesetiaan terhadap negara dan rasa keterikatan satu sama lain dalam bertanah air selalu berpotensi menghadapi persoalan terus menerus. Berhadapan dengan ini Dan mengatakan bahwa:

Orang bisa mencintai tanah air, tetapi jarang mencintai negara yang bikinannya itu. Pemerintah terpaksa menggarap kesetiaan dalam bentuk legitimasi, apakah dengan menciptakan sistem politik yang diterima masyarakat sebagai kepunyaan sendiri atau dengan membeli sokongan dari golongan-golongan kuat yang dimanfaatkan negara. Dalam republik murni legitimasi ini didasarkan atas hak partisipasi warganegara dan alat pengawasan terhadap kekuasaan pemerintah... (Pidato, hlm. 8)

Dari pandangan di atas, Dan membedakan dua jenis pola kewargaan, yang pertama adalah pola kewargaan yang lebih bersifat totaliteristik dan manipulistik yakni di mana keanggotaan dan kesetiaan kepada tanah air dibentuk dari atas dengan paksaan, misalnya dengan slogan nasionalisme kosong. Dan yang kedua melalui prinsip republik di mana karena negara dipandang sebagai ekspresi dari rakyat, maka dorongan untuk mempertahankan negara dan tanah air harus dikembalikan lagi kepada kemauan dan inisiatif warga di dalamnya. Di sini paham mengenai kewargaan yang inklusif dan adil menjadi sangat penting supaya setiap orang merasa diajak dalam berpartisipasi mempertahankan negara dan

tanah air, Dan mengatakan bahwa:

..soal suku dan minoritas pada umumnya, supaya dipandang bukan sebagai kelemahan dan bahaya, tetapi, karena ikatan emosional itu, malah bisa merupakan suatu sumber kekuatan republik, asal golongan-golongan yang ada diperlakukan secara adil. (Pidato, hlm. 9)

Dengan begitu, keberanggotaan rakyat ke dalam negara, secara prinsipil juga mempengaruhi bentuk, kualitas dan watak demokrasinya. Sejauh disadari dan dipertahankan negara sebagai sarana tujuan bersama untuk kemaslahatan umum, maka sebenarnya segi-segi fundamental berdemokrasi terdapat di dalamnya. Dengan demikian, di dalam mana keberanggotaan individu di dalam komunitas bangsa itu terjalin berdasarkan partisipasi dan kemauan yang otentik maka kewargaan dengan sendirinya adalah kewargaan yang demokratis. Dengan demikian, jelas bahwa bagi Dan Lev, pemerintahan-pemerintahan otoriter pada hakikatnya adalah pemerintahan yang bukan republik, meski bisa saja nama depannya menggunakan istilah Republik.

Kalau tugas pemerintah dipandang dalam konteks kebahagiaan masyarakat pada umumnya, sebanyak mungkin, dan bukan kebahagiaan beberapa golongan saja atau kebahagiaan staf negara sendiri, kekuatan republik akan didasarkan kekuatan ikatan yang karib

— bukan hanya suku, tetapi kota, desa, dan asosiasi, semacam patriotisme setempat, lokal, yang tidak keterlaluan tetapi menimbulkan kepercayaan diri dan perasaan berbak dan malah berkeinginan untuk berpartisipasi di dalam republik. Yaitu, keanggotaan dalam komunitas bisa membangkitkan kewarganegaraan yang kuat dan sehat. Kota dan desa yang kuat, yang mengurus rumah-tangganya sendiri, adalah landasan republik yang kuat..(Pidato, hlm. 9)

Fundamen Ketiga dalam Republik adalah soal pemisahan agama dan negara. Mengenai hubungan agama dan negara ini, Dan membuka bagian ini secara sangat menarik ia mengatakan bahwa:

...persaingan atas kesetiaan dan ketaatan rakyat, di mana negara minta loyalitas warganegara dan agama minta ketaatan pengikutnya pada Tuhan dan aturan agama. Kedua tuntutan ini kadang-kadang dianggap absolut. Kalau satu atau lain menang, dapat dibayangkan betapa sulit dan bahaya juga, dan terlihat dalam sejarah bahwa penyelesaian macam itu tidak pernah bisa taban lama... (Pidato. Hlm. 11)

Sebenarnya persaingan antara negara dan agama hanya satu bagian

saja dari persaingan alamiah yang lainnya: yakni misalnya antara negara dan etnisitas, antara negara dan lokalitas suku. Selalu ada ketegangan antara negara sebagai yang mengatasi entitas partikular dengan fragmen-fragmen di bawahnya. Dan Lev sendiri mengakui bahwa ketegangan ini adalah ketegangan yang permanen yang selalu butuh pemikiran dan jalan keluar terus menerus. Namun demikian, secara sepintas, dalam mengatasi ketegangan itu ia mengatakan bahwa:

Manusia nampaknya perlu atas identitas, pedoman moralitas, dan makna hidup yang ditawarkan agama, tetapi perlu juga atas fleksibilitas dan daya adaptasi negara yang sedikit banyak sekuler. Ambivalensi ini tidak akan hilang, yang berarti bahwa masyarakat membutuhkan kedua-duanya dan juga bahwa negara dan agama perlu satu sama lain. (Pidato. Hlm. 11)

Dengan demikian, di dalam Dan justru supaya kehidupan keagamaan yang beragam itu menjadi inspiratif dan berfungsi sebagai salah satu sumber etis dalam kehidupan politik, agama harus berada dalam relasi yang longgar dengan negara. Paham semacam ini juga sebenarnya sudah bisa dimengerti dari konsepsi kewargaan Republikan-nya di atas. Dalam posisi di mana identitas republik itu menjadi identitas yang diakui bersama sebagai identitas warga, maka republik menjadi semacam wahana yang memisahkan arena privat dan primordial. Kehidupan privat dan primordial tidak dihancurkan, melainkan diatasi supaya setiap orang bisa berpartisipasi secara setara. Ini mengapa bagi Dan betapapun relasi agama-negara itu bersifat alamiah, namun syarat agar relasi itu sehat justru harus ada pengertian bahwa negara harus sekuler. Di dalam republik, diyakini bahwa kualitas seorang warga bukan ditentukan oleh ras, agama dan etnisnya, melainkan pada inisiatifnya dalam memperjuangkan kepentingan umum.

Apa yang Bisa Dipetik dari Republikanisme

Pandangan Dan pada 1995 ini demikian fundamental dan mengajak kita untuk berkesimpulan bahwa ada yang harus kita ubah dalam cara kita memandang demokrasi dan berdemokrasi. Entah karena trauma otoritarianisme, entah karena keterbatasan ide politik, selama ini kita terlanjur menganggap demokrasi sebagai satu-satunya jawaban serta resep untuk semua kekurangan dan penyakit yang tumbuh dalam kehidupan berbangsa entah itu di wilayah politik, ekonomi maupun sosial. Korupsi, disharmonisasi sosial dan budaya, kerusuhan,

ketidakadilan, kekerasan; semua penyakit tersebut selalu hanya dilihat dan diobati dengan demokrasi.

Kita memperlakukan konsep demokrasi tidak hanya secara 'berlebihan' tapi juga salah, yakni dengan menempatkannya sebagai satu-satunya sumber segala yang baik tentang politik.

Titik pangkal kesalahan berdemokrasi ini adalah kuatnya tranhistorisasi konsep demokrasi yang mendorong segenap aktornya untuk menempatkan ideal demokrasi sebagai instrumen tunggal baik demi tujuan menundukan rejim otoritarian maupun untuk menata dan mengisi rejim politik yang baru pasca otoriterian. Sementara realitas memperlihatkan bahwa bagi perjuangan di masa otoritarian, demokrasi memang harus menjadi *main course* dalam politik, namun bagi perjuangan di masa pasca Soeharto kini, demokrasi tetap penting tetapi mungkin hanya sebagai suplemen. Mengapa? Karena jelas persoalan-persoalan fundamental pada masa otoritarian sudah pasti berbeda dengan masa-masa sesudahnya, di mana untuk konsep dan ideal yang sama memang tidak dapat dipakai menjangkau tantangan-tantangan baru yang belakangan ini muncul.

Ketidakmampuan demokrasi itu dapat kita lihat dalam paling tidak tiga persoalan. **Pertama**, karena hanya berpengalaman dalam menatapkan konsepsi demokrasi yang berbasis hak dan universal, maka demokrasi di Indonesia saat ini tidak mampu atau paling tidak terlalu lemah untuk menjawab persoalan integrasi sosial, kekerasan komunal, tribalisme dan munculnya berbagai bentuk politik sektarian belakangan ini.

Hal ini disebabkan oleh faktor yang persis sebagaimana diungkapkan Habermas mengenai konflik antara *universalistic principles on the one hand and the particularistic claims of community to preserve the integrity of their habitual ways of life on the other*. Soal-soal ini tidak hanya mengangkat tantangan terhadap identitas nasional Indonesia secara umum tetapi juga prinsip-prinsip dasar kehidupan bersama yang paling fundamental. Demokrasi apalagi yang terlampau berbasis pada prinsip hak individual yang selama ini diandalkan terutama sekali tidak dapat menjawab tantangan dalam soal ini.

Soal Kedua yang juga tidak dapat dijawab oleh demokrasi adalah globalisasi neoliberal, demokrasi bukan hanya tidak mampu menjawab tantangan globalisasi neoliberal, dalam kasus Indonesia demokrasi

justro lebih dipakai untuk melancarkan kepentingan –kepentingan pasar neoliberal ketimbang untuk mendorong keadilan sosial yang lebih luas, sebagaimana nampak dari pelbagai gejala privatisasi sektor publik. Implikasi dari gejala ini yang kemudian dikhawatirkan oleh penulis-penulis seperti Noreena Hertz yang melihat jeli bahwa kebebasan dasar demokrasi secara jitu lebih bisa dimanfaatkan oleh globalisasi kapitalisme ketimbang untuk keadilan. Sementara Amy Chua melihat munculnya kekerasan, komunalisme dan rasisme sebagai akibat atau reaksi dari perselingkuhan demokrasi dengan ekonomi pasar.

Titik **ketiga** impotensi demokrasi di Indonesia adalah dalam menjawab tantangan untuk ‘memurnikan’ kembali politik sebagai area dignitas. Dalam pengalaman Indonesia belakangan, demokrasi bukan hanya sama sekali jauh dari memadai untuk membawa kembali politik ke hakekatnya yakni untuk keutamaan umum dan membersihkan politik dari korupsi, manipulasi, suap serta mendorong tata pembentukan sebuah republik konstitusional yang sehat, progresif dan bermartabat.

Demokrasi dalam prakteknya kini justru lebih banyak dipakai sebagai kendaraan impunitas bagi para koruptor dan para cukong (*political entrepreneur*). Akibat nyata dari keadaan ini sekali lagi adalah, makin kaburnya keutamaan-keutamaan publik seperti keadilan, kedamaian, akal sehat dari kehidupan politik dan makin terasingnya dunia serta aktor politik di Indonesia dari tujuan-tujuan mulia semula dari politik. Dalam suasana semacam ini, munculnya ide calon independen misalnya, meski bisa harus diakui akan menambah liberalisasi politik di satu sisi, namun sejauh yang bisa masuk dan mengakses politik adalah para juragan di daerah, maka dalam tahap akhir ia justru bisa menghancurkan demokrasi secara prinsipil.

Fakta mengenai ketidakmampuan ini, sebenarnya telah terasa segera setelah publik menyadari bahwa segala hal menyangkut penataan politik pasca Soeharto itu berjalan demikian tersendat-sendat: ideologi ekonomi yang itu-itu juga; ketidakadilan sosial yang belum tertangani secara komprehensif; hilangnya *public civility*, segregasi dan sektarianisme yang menguat serta hilangnya antusiasme umum terhadap politik. Namun demikian, kesadaran untuk melakukan perubahan nampaknya belum juga mampir di kalangan kaum reformis sendiri. Ini terutama disebabkan oleh dua hal: yakni keterbatasan ideal politik di kalangan reformis sendiri atau bisa jadi karena ketergantungan dan keterpesonaan

mereka terhadap apa yang sudah ada yang dihasilkan oleh sistem politik rutin yang berlangsung.

Yang jelas ketergantungan kaum reformis yang berlarut-larut ini telah berakibat fatal. Dan untuk itu kita harus membayarnya mahal yakni dengan hilangnya kesempatan mereka untuk merebut klaim menyelesaikan persoalan-persoalan fundamental pasca Soeharto dari kekuatan konservatif dalam politik belakangan ini.

Salah satu jalan terbaik di arena politik untuk meneruskan agenda perubahan, hijrah dari politik Orde Baru, memperluas kesetaraan dan keadilan adalah pertama: kaum reformis yang masih tersisa saat ini harus segera mentransformasi ideal demokrasi (dan hak asasi manusia) ke dalam sebuah konsepsi dan gerakan baru yang memiliki basis nyata di dalam situasi baru demokrasi saat ini.

Di titik ini ideal republik sebagaimana dianjurkan oleh Dan Lev dulu menjadi sangat penting untuk dipikirkan. Ideal Republikanisme yang lebih luas dan fundamental perlu diupayakan bukan untuk menggantikan demokrasi melainkan justru untuk melengkapinya dan mengiringi demokrasi. Supaya demokrasi benar-benar bisa menjadi jalan bagi keadilan dan kebebasan yang sejati bagi seluruh rakyat Indonesia.